

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai penutup, penulis ingin menegaskan lagi beberapa hal yang telah penulis kemukakan di atas.

Pertama, berkaitan dengan penempatan posisi dan peran politik raja, dalam pemikiran politik Jawa didasarkan pada dua landasan: pertama, dalam pemikiran Jawa diakui adanya paralelisme antara makro kosmos dengan mikro kosmos. Antara dunia "para dewa" atau "dunia Tuhan" dengan dunia tempat manusia hidup. Kedua, ada kebutuhan interaksi antara makro kosmos dan mikro kosmos. Dua kosmos itu dianggap "menyatu" secara interaksionis. Berdasarkan landasan tersebut raja ditempatkan sebagai pusat mikro kosmos, pusat kerajaan manusia di dunia. Pada puncak hierarki kerajaan, raja "duduk sendiri". Raja memiliki kekuasaan mutlak tanpa batas.

Kedua, dalam praktek politik orde baru secara struktural, presiden adalah orang yang duduk dalam hierarki tertinggi pemerintahan. Posisi puncak hierarki yang diduduki presiden tersebut praktis ditempatinya "sendiri". Karena pada dasarnya tidak menempatkan wakil presiden sebagai pemegang posisi kunci dalam pemerintahan yang memiliki kekuasaan riil dan prinsipil.

Ketiga, formasi kekuasaan raja Jawa bersifat halus karena berdasarkan pada ketentuan-ketentuan alamiah yang tidak dapat direkayasa secara sosial. Raja dipercaya sebagai wakil Tuhan di dunia dan masyarakat Jawa percaya bahwa "Tuhan menentukan wakilnya" itu melalui satu garis keturunan. Pengakuan kekuasaan raja bagi masyarakat Jawa merupakan tuntutan moral, politik, sekaligus magis. Sedangkan kekuasaan presiden orde baru lebih dibentuk secara struktural. Rekayasa struktural politik telah berperan menempatkan presiden dalam kekuasaan yang luas. Akumulasi kekuasaan presiden orde baru tidaklah bersifat total, melainkan dilekati sifat distributif. Meskipun presiden memiliki kekuasaan konkrit dan luas, kekuasaan tidak sepenuhnya berkumpul dalam tangan presiden, melainkan terdistribusi pula pada kekuatan politik lain yang mendiami kekuasaan negara.

#### B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan dimaksudkan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menghadapi masalah-masalah yang sangat erat hubungannya dengan paham kekuasaan Jawa. Maka penulis mencoba memberanikan diri mengemukakan saran-saran serta pertimbangan sebagai berikut: Dalam budaya Jawa, sekalipun banyak orang yang menilai terlalu punya kecenderungan feodal dari pada demokratis, namun ada nilai-nilai dan

kebiasaan tertentu dari komunitas masyarakat Jawa yang relatif punya relevansi dengan nilai-nilai demokrasi. Terlebih lagi jika praktek-praktek kita tarik jauh ke belakang dari era kehidupan berbangsa dan bernegara dari masyarakat Jawa.

Beberapa aspek yang dapat dijadikan paham untuk dikonfirmasi terhadap proses demokratisasi dari kebudayaan Jawa dapat dilihat dari pepatah yang mengatakan: *desa mawa cara negara mawa tata*. Desa yang mempunyai cara tertentu mungkin berbeda dengan desa lainnya. Hal inilah yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menata negara dan untuk kepentingan yang lebih besar. Demikian pula dalam konsep *memayuhayuningrat* bagi seorang raja atau presiden. Meskipun kehadirannya atau kekuasaannya lantaran memperoleh wahyu yang diturunkan Tuhan kepadanya, namun harus dijalankan untuk kepentingan rakyat dan negara.

### C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan pada Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menghadapi segala rintangan, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Sekalipun dengan usaha maksimal, kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari atas kekurangan dan kelemahan sebagai

keterbatasan dari seorang manusia. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis berharap kepada para pembaca untuk memberikan saran dan koreksi demi perbaikan di masa mendatang.

Semoga tulisan ini dapat mendatangkan manfaat yang baik khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.